



Analisis Budaya Kemiskinan (*Culture of Poverty*) dan Alternatif Intervensi Psikososial untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sorong

Muh Azis Muslim, Kania Falahiatika Hidayat*, Muhammad Fadlan Amaruddin
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
*kaniafalahiatika@gmail.com

Abstract

Sorong Regency, located in Southwest Papua Province, is among the regions facing a serious poverty problem, where the number of people living in poverty has decreased by only 350 over a span of seven years, despite at least IDR 739.8 billion being allocated to poverty alleviation efforts. While numerous studies have identified structural factors as contributing to persistent poverty, few have examined the cultural dimensions. This study aims to identify the cultural roots of poverty in Sorong Regency and to propose psychosocial intervention alternatives that have proven effective in generating sustainable poverty reduction outcomes. The research adopts a qualitative approach, employing in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and participatory observation techniques. Findings indicate that patterns of dependency, resignation to fate, and limited social motivation are key elements of the culture of poverty in Sorong Regency. It is recommended that psychosocial interventions be implemented in the form of life skills training and the development of aspirations, using a spiritual approach through the strengthened involvement of the Church.

Keywords: Culture of Poverty; Psychosocial Intervention; Social Dependency; Sorong Regency; Community Empowerment

Abstrak

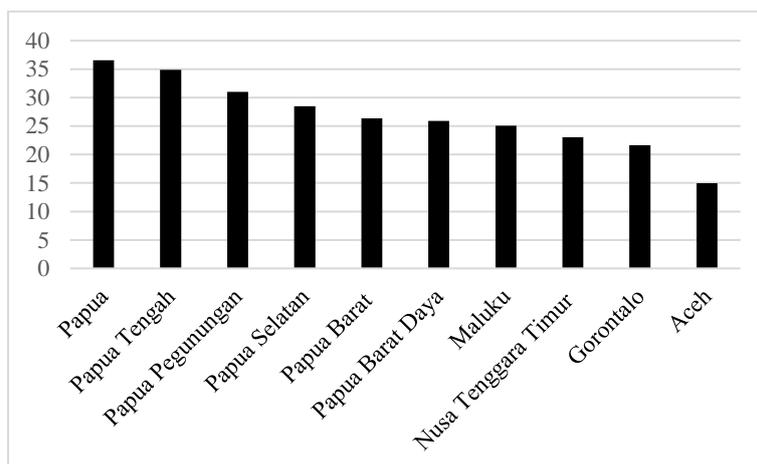
Kabupaten Sorong yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu daerah dengan masalah kemiskinan yang serius, di mana hanya ada penurunan 350 penduduk miskin dalam tujuh tahun, dengan setidaknya dana sebesar Rp739,8 miliar yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Sudah ada banyak penelitian yang menemukan bahwa faktor struktural berpengaruh terhadap kemiskinan yang berkelanjutan, tetapi hanya sedikit yang menyoroti peran budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong dan menawarkan alternatif intervensi psikososial yang ditemukan efektif untuk menghasilkan dampak berkelanjutan pada pengurangan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, *forum group discussion* (FGD), dan observasi partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa pola ketergantungan, pasrah pada nasib, dan minimnya dorongan sosial menjadi faktor utama dari budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong. Disarankan agar dilakukan intervensi psikososial berupa pelatihan keterampilan hidup dan pembentukan aspirasi dengan pendekatan spiritual melalui penguatan peran Gereja.

Kata Kunci: Budaya Kemiskinan; Intervensi Psikososial; Ketergantungan Sosial; Kabupaten Sorong; Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

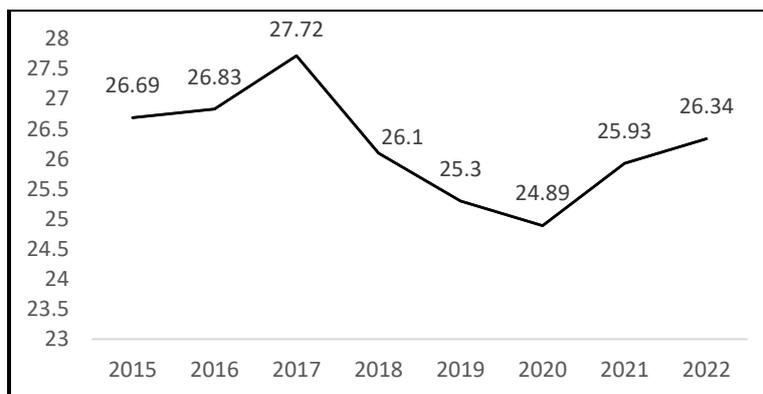
Tanah Papua masih menjadi wilayah termiskin di Indonesia selama 23 tahun sejak diberlakukannya otonomi khusus (otsus) pada tahun 2001. Padahal salah satu tujuan dari pemberian otsus adalah mengurangi kesenjangan antara Papua dengan daerah lainnya di Indonesia, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Beberapa kewenangan yang diberikan dalam kerangka otsus adalah: 1) politik, yakni diperbolehkannya masyarakat Papua untuk mendirikan partai politik; 2) ekonomi, yakni pemberian dana otsus sebesar 2,25% dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional, dana tambahan infrastruktur (DTI), dan mendapatkan proporsi 70% dana bagi hasil (DBH) sektor minyak dan gas; serta 3) budaya, yakni dibentuknya Majelis Permusyawaratan Papua (MRP) yang memiliki kewenangan khusus dalam melindungi hak budaya OAP, pengukuhan bendera dan lagu daerah sebagai simbol budaya Papua, serta jabatan gubernur dan wakil gubernur yang hanya dapat dijabat oleh OAP. Situasi ini menunjukkan bagaimana pemberian kewenangan politik, ekonomi, dan budaya yang besar tidak memberikan jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi OAP.

Jika kita lihat dari perspektif yang lebih luas, kemiskinan berkepanjangan ini tidak hanya terjadi di Tanah Papua, tetapi juga wilayah lain di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Terlihat dari Gambar 1, seluruh provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia merupakan provinsi-provinsi di wilayah KIT, kecuali Aceh. Pembangunan yang cenderung tersentralisasi di area barat tidak dapat dipungkiri melahirkan hambatan struktural yang serius bagi daerah di KIT. Hambatan struktural tersebut seperti konektivitas yang buruk, tingginya biaya logistik, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, ketergantungan pada sektor primer dengan produktivitas rendah, buruknya pengelolaan dana pembangunan, dan konflik yang berkepanjangan.



Gambar 1. 10 Provinsi dengan Presentase Kemiskinan Tertinggi Tahun 2024
(Sumber: Widyasanti, 2024)

Seluruh provinsi-provinsi di Tanah Papua yang berjumlah enam masuk ke dalam daftar daerah dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Melihat itu, peneliti tertarik untuk meneliti kemiskinan yang berkepanjangan di Tanah Papua, khususnya Kabupaten Sorong yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Terlihat dari Gambar 2 di bawah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sorong sempat menurun sebesar 2,83 ribu orang dari tahun 2017 hingga 2020, tetapi kemudian konsisten meningkatkan sebanyak 1,45 ribu orang sampai tahun 2022. Berdasarkan besaran persentasenya, terdapat penurunan capaian dari sebesar 33,35% pada tahun 2015 menjadi 27,58% pada tahun 2022, dengan jumlah penurunan penduduk miskin sebesar 350 orang (Gusti, 2023)



Gambar 2. Tren Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sorong (Dalam Ribuan)

(Sumber: Gusti, 2023)

Penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 350 orang dalam kurun waktu tujuh tahun terbilang cukup rendah dibandingkan dengan dana yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Sorong (Pekab Sorong) untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Terlihat pada Tabel 1 di bawah, bahwa dalam kurun waktu tersebut tidak kurang dari Rp739,8 miliar sudah dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan. Nominal realisasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dimungkinkan lebih besar dari jumlah tersebut, karena banyak pula program-program yang bukan berbentuk bantuan sosial atau pun hibah, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sorong. Program-program tersebut seperti pembangunan sekolah, puskesmas, dan jalan; pelatihan kerja; pemberian bibit ternak; dan lain-lain.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Sorong Tahun 2015-2022

Tahun	Realisasi Bansos			Realisasi Hibah		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2015	43.950.000.296	35.700.000.000	81%	90.568.657.227	72.008.595.838	79,5%
2016	19.600.000.000	9.550.000.000	49%	105.681.800.000	93.290.207.020	88%
2017	8.232.530.000	4.993.000.000	61%	44.504.760.000	33.968.892.068	76%
2018	14.000.000.000	11.467.500.000	82%	53.662.250.000	42.980.675.000	80%
2019	10.740.965.000	6.132.300.000	57%	88.958.835.000	71.392.152.524	80%
2020	16.000.000.000	7.967.000.000	50%	104.245.480.861	77.808.137.036	74,6%
2021	53.275.259.272	48.663.725.999	91%	88.865.667.597	83.408.734.748	93,8%
2022	28.842.422.016	27.540.462.726	95%	127.434.417.252	112.897.374.036	88,5%
Total	239.277.742.584	229.631.754.206	96%	728.161.867.937	617.932.599.510	84,8%

(Sumber: Yatun, 2024)

Hampir seluruh penelitian mengenai kemiskinan di Tanah Papua menemukan besarnya pengaruh faktor struktural terhadap rendahnya kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kemiskinan struktural menunjukkan bahwa seseorang menjadi miskin bukan karena ia tidak bekerja keras, tetapi karena sistem ekonomi tidak memberinya kesempatan untuk bekerja dan pendapatan tidak terdistribusi secara merata (Ogbeide & Agu, 2015). Rendahnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas sekolah, buruknya layanan kesehatan, banyaknya wilayah yang belum terakses karena infrastruktur jalan yang belum ada atau rusak, keterbatasan akses terhadap air bersih, kesempatan kerja yang masih belum banyak, dan lain-lain ditemukan berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Tanah Papua (Ginting et al., 2020; Lumbantoruan et al., 2023; Miranti, 2017; Romadhon, 2024). Menambahkan faktor-faktor tersebut,

Kambuaya dan Kambuaya (2024) menyebutkan bahwa kentalnya korupsi dan penyalahgunaan dana oleh pejabat pemerintah lokal berpengaruh besar terhadap terbentuknya kemiskinan struktural di Tanah Papua, sebagaimana dana tidak dipergunakan pada pembangunan infrastruktur atau program lainnya yang berdampak terhadap angka kemiskinan.

Kendati sudah ada banyak penelitian yang membahas kemiskinan struktural yang terjadi Tanah Papua, tetapi masih sedikit literatur yang menyelidiki faktor budaya dalam pembentukan kemiskinan yang berkepanjangan di Tanah Papua. Padahal budaya dapat meningkatkan atau menghalangi kekuatan struktural, dan terkadang mereka memediasi efek perubahan atau kerugian struktural (Patterson, 2014). Oscar Lewis (1966) mengungkapkan bahwa kemiskinan yang berkelanjutan menghasilkan budaya kemiskinan yang cenderung akan terus berlanjut dan diwariskan seiring berjalannya waktu, bahkan jika kondisi struktural yang awalnya memunculkannya berubah. Ia menyebutnya sebagai *culture of poverty* (budaya kemiskinan), yang merujuk pada serangkaian sikap, kepercayaan, nilai, dan praktik budaya (Lewis, 1966). Mengingat bahwa kemiskinan telah berlangsung lama di Tanah Papua, maka besar adanya kemungkinan berkembangnya budaya kemiskinan pada OAP di Kabupaten Sorong.

Terdapat beberapa karakteristik yang menandai seseorang mengembangkan budaya kemiskinan, yaitu orientasi masa kini yang kuat, tidak adanya tabungan, suka bergaul, ketidakmampuan untuk menunda kepuasan, memiliki perasaan yang kuat akan keterpinggiran, ketidakberdayaan, ketergantungan, perasaan rendah diri, serta rasa pasrah dan fatalisme (Lewis, 1998). Di samping itu, orang-orang dengan kebudayaan kemiskinan cenderung mengisolasi dirinya dari hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka hanya mengetahui masalah, lingkungan, dan cara hidup mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa melihat kesamaan antara masalah mereka dengan masalah orang lain seperti mereka di wilayah atau bagian dunia yang lain. Budaya kemiskinan bisa tumbuh karena berada dalam kemiskinan material, berbarengan dengan dikucilkan, terpinggirkan, atau dirugikan secara sosial, mengakibatkan seseorang mengalami *learned helplessness* (Dixon & Frolova, 2011). *Learned helplessness* merujuk pada keyakinan individu bahwa mereka tidak memiliki kendali atas keadaan mereka, bahkan ketika ada peluang untuk memperbaiki situasi mereka. Hal ini berkembang setelah seseorang berulang kali terpapar pada kondisi atau kegagalan yang merugikan, yang menyebabkan kepasifan, motivasi rendah, dan kepasrahan (Moldenhauer et al., 1999).

Karakteristik budaya kemiskinan yang ditemukan kental pada OAP di Kabupaten Sorong berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya kelurahan/desa adalah ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada dependensi masyarakat terhadap bantuan pemerintah sebagai pendapatan rutin dan tidak berupaya optimal untuk mengembangkan keterampilan maupun mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Aminah et al. (2023) yang dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya (termasuk Kabupaten Sorong), di mana masyarakat mempunyai ketergantungan terhadap pihak eksternal, khususnya bantuan pemerintah. Bukan hanya itu, kerap kali bantuan pemerintah yang diterima oleh masyarakat digunakan untuk berpesta dan meminum alkohol, alih-alih untuk hal-hal yang bersifat produktif. Dengan demikian, terdapat dugaan bahwa masalah kemiskinan yang serius di Tanah Papua bukan hanya disebabkan oleh faktor struktural dan politik, tetapi juga budaya kemiskinan yang berkembang di sana. Masalah ini perlu ditangani dengan serius karena menciptakan *poverty trap*.

Kabupaten Sorong menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena pada masa Orde Baru menjadi daerah transmigrasi, sehingga menciptakan adanya akulturasi budaya yang dapat menambah warna pada penelitian budaya kemiskinan. Pada saat itu,

Pemerintah Orde Baru mendorong para transmigran dari Jawa dan Sumatera untuk pindah ke Kabupaten Sorong, karena mereka dianggap “lebih maju” untuk mentransfer pengetahuan pertanian mereka kepada orang Papua yang dianggap tertinggal (Rumkabu, 2022). Hal ini mencerminkan adanya anggapan bahwa tradisi budaya di Papua menghambat intervensi pembangunan, sehingga perlu dimodernisasi. Modernisasi ini menyebabkan OAP kehilangan pegangan terhadap budaya yang telah mereka terapkan sejak lama dan mengakibatkan krisis identitas (Suryawan, 2015). Program transmigrasi ini mengakibatkan jumlah OAP di Kabupaten Sorong kurang lebih sepertiga dari jumlah seluruh penduduk yang tinggal di sana. Elmslie dan Webb-Gannon (2014) menyatakan bahwa fenomena depopulasi ini dapat disebut sebagai genosida gerak lambat terhadap OAP.

Konsep budaya kemiskinan memang sempat dikritik oleh beberapa akademisi (Cole et al., 1971; Labov, 1972; Leacock, 1980; Morrison, 1993). Alasan utamanya adalah karena budaya kemiskinan cenderung menyalahkan korban dengan mengabaikan ketidaksetaraan sistemik, rasisme, dan standar yang bias. Tetapi kemudian konsep budaya kemiskinan muncul kembali dengan argumen dan data yang lebih baik. Vaisey (2010) menilai para sarjana terlalu gegabah untuk mengabaikan peran budaya kemiskinan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya menemukan adanya perbedaan aspirasi pendidikan antara pemuda miskin dan tidak miskin.

Salah satu tulisan paling berpengaruh terhadap perkembangan budaya kemiskinan adalah gagasan budaya dan kemiskinan oleh Small et al. (2010). Mereka membantah adanya orientasi budaya orang miskin, sebagaimana pada dasarnya kaum miskin memiliki banyak pandangan budaya yang sama dengan kelas menengah dan ada variasi yang signifikan dalam perilaku, pengambilan keputusan, dan hasil di antara orang-orang yang hidup dalam kondisi struktural yang tampaknya identik. Kendati begitu, Small et al. (2010) mengemukakan bahwa pengabaian terhadap budaya dapat mengarah pada kebijakan yang tidak tepat sasaran jika motivasi sebenarnya dari orang miskin disalahpahami atau diabaikan. Berangkat dari gagasan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong, sebagai upaya untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian terdahulu telah berhasil menggarisbawahi perspektif Lewis bahwa budaya dalam keluarga miskin pada populasi Afrika-Amerika melanggengkan kerugian dalam hal perumahan, pendidikan, kejahatan, dan pasar tenaga kerja (Bell et al., 2016). Penelitian Livingston et al. (2020) menemukan bahwa budaya kemiskinan berkontribusi menciptakan *generational poverty* pada keluarga kulit hitam dengan kepala keluarga perempuan. Disebutkan bahwa budaya kemiskinan lahir dari ketidakmerataan ekonomi yang mengurangi kemampuan orang dewasa untuk mengendalikan perilaku mereka dan untuk mengejar tujuan jangka panjang (Livingston et al., 2020).

Pada konteks Indonesia, Dekasari et al. (2018) menemukan adanya beberapa bentuk budaya kemiskinan pada masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo, seperti keengganan untuk pindah karena takut kehilangan pekerjaan sebagai buruh dan pemulung, bahkan menerima kondisi seringnya terkena banjir. Adapun penelitian lain tidak ada yang secara spesifik mengkaji mengenai budaya kemiskinan. Misalnya Anggraini (2008), meneliti perilaku anggota rumah tangga miskin dalam memanfaatkan bantuan langsung tunai (BLT) di Kota Padang. Ditemukan bahwa dana BLT digunakan untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Penelitian lain di Kecamatan Nagari Lagan Hilir menemukan bahwa penerima program keluarga harapan (PKH) merasa besaran bantuan terlalu kecil dan berharap pemerintah meningkatkan jumlahnya (Ekardo et al., 2014).

Kendati sudah ada beberapa penelitian yang menyoroti budaya kemiskinan, tetapi tidak ada penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor mendasar yang

berkontribusi terhadap munculnya budaya kemiskinan, khususnya pada OAP di Kabupaten Sorong. Misalnya pada penelitian Sugandi (2008), ia hanya mengungkapkan bahwa masyarakat Papua mudah terjebak pada nilai-nilai negatif sebagai imbas dari modernisasi, salah satunya adalah malas dan kurangnya motivasi untuk belajar di sekolah. Kemudian penelitian lain di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua mengungkapkan adanya pergeseran gaya hidup sederhana dengan mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian, menjadi hidup dengan bermalas-malasan (Tabuni et al., 2013). Di samping itu, penelitian ini juga menawarkan alternatif intervensi psikososial yang kontekstual sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang berkepanjangan di Kabupaten Sorong. Hal ini didukung oleh beberapa temuan yang menunjukkan bahwa menggabungkan intervensi ekonomi dan dukungan psikososial dapat menghasilkan dampak berkelanjutan pada pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan dari waktu ke waktu (Banerjee et al., 2021; Blattman et al., 2017; Lang et al., 2023; Pitch et al., 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi akar budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong dan menawarkan alternatif intervensi psikososial yang dapat diterapkan. Pemahaman yang mendalam mengenai budaya kemiskinan vital untuk mendukung efektivitas upaya pengentasan kemiskinan, karena kurangnya pemahaman secara akurat mengenai pengaruh budaya dan membuat asumsi yang tidak akurat tentang perilaku atau nilai-nilai, mengakibatkan kegagalan pada program pengentasan kemiskinan (Small et al., 2010). Utamanya karena individu yang mengembangkan budaya kemiskinan tidak siap secara emosional untuk memanfaatkan peluang apa pun yang mungkin muncul untuk meningkatkan standar hidup mereka (Jindra & Jindra, 2016). Hasil penelitian ini dapat berkontribusi besar dalam mendesain kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif karena merangkul karakteristik budaya OAP menjadi kekuatan pendukung.

Tujuan penelitian akan dijawab dengan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini menawarkan desain penelitian naturalistik yang tujuannya adalah mempelajari perilaku dalam lingkungan alami (Gelo et al., 2008). Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya untuk mengungkap mengapa dan bagaimana budaya kemiskinan terjadi di Kabupaten Sorong dengan memeriksa sikap, perilaku, pengalaman, atau fenomena sosial pihak berkepentingan dalam lingkungan alaminya. Informan penelitian ini merupakan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sorong, serta masyarakat OAP maupun non-OAP yang bertempat tinggal di Kabupaten Sorong.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat budaya kemiskinan pada OAP melalui rekonstruksi perspektif pribadi, pengalaman, dan pemahaman masing-masing aktor berkepentingan. Dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif, peneliti bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan berkembangnya budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong, dan bagaimana relasi antara budaya kemiskinan dengan kemiskinan persisten di wilayah tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk pemilihan informan adalah *purposive sampling*. Aktor yang menjadi informan dalam penelitian ini di antaranya adalah OAP yang berada dalam kondisi prasejahtera, masyarakat non-OAP, aparaturnya kelurahan/desa, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sorong. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dengan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah terkait, serta *forum group discussion* (FGD) bersama pejabat SKPD Pemerintah Kabupaten Sorong pada Juli 2024. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sorong

Beragam upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Dalam hal ini, Dinas Sosial bukan satu-satunya SKPD yang menyelenggarakan program untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga SKPD lain melalui program yang selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh SKPD dengan pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sorong terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Program Pengentasan Kemiskinan dengan Sumber Dana Berasal dari APBD Kabupaten Sorong

No.	Kategori	Program	Pelaksana
1	Pengurangan Beban Pengeluaran	Pasar Murah	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi• Dinas Ketahanan Pangan• Dinas Peternakan
		Subsidi Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi• Dinas Ketahanan Pangan• Dinas Perikanan• Dinas Peternakan
		Paket Sembako	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Ketahanan Pangan
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelatihan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Bantuan Pemberian Bibit	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Bantuan Pemberian Hewan Ternak	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Subsidi Pupuk	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan	Sekolah Gratis	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Bus Sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<i>Doc Touch</i>	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kesehatan

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024

Melihat Tabel 2 di atas, intervensi yang dilakukan Pemkab Sorong dalam mengentaskan kemiskinan telah menyentuh berbagai aspek yang berkorelasi kuat dengan kondisi kemiskinan. Mayoritas dari program diperuntukkan hanya bagi OAP, karena program-program yang didukung oleh dana otsus hanya boleh disalurkan kepada OAP. Kualitas implementasi memang mempunyai pengaruh kuat terhadap efektivitas program, tetapi para penerima program pengentasan kemiskinan juga mempunyai peran yang signifikan. Tanpa adanya pemahaman yang baik dari para penerima program terhadap

tujuan program, motivasi untuk terlibat dalam program secara optimal, dan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya, maka tidak akan bisa menghasilkan dampak yang sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Kondisi Budaya Kemiskinan di Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer maupun sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa pola pikir, keputusan, dan perilaku pada OAP yang bersifat kontradiktif dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, masih awanya anggapan bahwa sekolah membuang-buang waktu. Kebanyakan dari orang tua OAP berpikir bahwa membantu orang tua bekerja merupakan hal yang lebih produktif dibandingkan sekolah yang hasilnya tidak langsung terlihat. Whiting (1971) menyebut kondisi ini sebagai “*anti-intellectual bias*”, yang menurutnya menjadi karakter dalam budaya kemiskinan. Terminologi tersebut menunjukkan gagasan bahwa orang miskin cenderung tidak mampu membina dan mendukung pertumbuhan pendidikan anak-anak mereka, sebagaimana orang tua mereka sendiri tidak terbiasa dengan kosakata, kurikulum, dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan (Phillips, 2018). Pola pikir yang masih melekat pada banyak orang tua OAP tersebut menjadi penghalang bagi mereka dan keturunannya untuk keluar dari *generational poverty*.

Mayoritas OAP mengandalkan berkebun, menangkap ikan, menjadi buruh pelabuhan dan pasar, serta pedagang kecil seperti berdagang pinang, atau pun buah-buahan lain hasil panen pohon milik pribadi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Persoalannya mayoritas OAP melakukan kegiatan tersebut hanya untuk memenuhi konsumsi pribadi, kemudian sisanya dijual untuk menjadi tambahan pemasukan. Akibatnya pekerjaan yang dilakukan tidak efektif meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di samping itu, mereka juga cenderung enggan untuk berkembang, yang ditunjukkan dengan budaya kerja subsisten, yakni cara kerja berkebun dan menangkap ikan secara tradisional yang diturunkan dari generasi sebelumnya, sehingga kuantitas produk yang dihasilkan sangat terbatas. Menurut Muller (2013), OAP hanya melakukan apa yang paling mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Minimnya ekspektasi OAP terhadap nilai pentingnya pendidikan dan keengganan untuk berkembang dalam bekerja menunjukkan eksistensi budaya kemiskinan berupa kecenderungan orientasi masa kini. Lantaran sikap dan perilaku tersebut merefleksikan nihilnya aspirasi untuk mengembangkan kualitas hidup di kemudian hari melalui investasi pada keterampilan diri. Menurut Lewis, orientasi masa kini yang kuat dengan kemampuan yang relatif kecil untuk merencanakan masa depan akan membuat seseorang sulit untuk keluar dari kelas bawah.

Seseorang yang berorientasi pada masa kini (*present*) akan condong menunjukkan perilaku hedonistik atau pun fatalistik. Individu hedonistik hidup untuk kesenangan hari ini dengan sedikit perhatian untuk hari esok dan menghindari ketidaknyamanan, sementara fatalistik tidak percaya bahwa apa pun yang mereka lakukan, atau akan lakukan, kemungkinan akan membuat perbedaan dalam hidup mereka (Zimbardo & Boyd, 2014). Peneliti menemukan adanya eksistensi perilaku hedonistik yang berkembang pada OAP berdasarkan wawancara dengan masyarakat non-OAP yang bertempat tinggal di Kabupaten Sorong. Hal ini terefleksi dari beberapa kasus dijualnya bantuan bibit ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang seharusnya dikembangkan, tetapi dijual untuk mendapatkan uang secara langsung oleh Kelompok Peternak Asli Papua. Berikut kutipan wawancara terkait yang disampaikan:

Di sini ada kelompok-kelompok peternak, jadi bantuan pemerintah diberikan ke kelompok itu. Ada banyak kasus bibit sapi yang dikasih malah dijual, jadi kan dapet uang langsung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lazimnya beberapa waktu setelah pemberian bibit ternak akan dilakukan monitoring oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tetapi, masih banyak kelompok peternak Asli Papua yang tetap menjual bibit ternak yang diberikan, kendati terdapat ancaman tidak akan diberikan bantuan lagi untuk ke depannya. Ketidakmampuan menahan kepuasan yang ditunjukkan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau uang tanpa adanya usaha ini merupakan salah satu karakteristik budaya kemiskinan menurut Lewis. Hal ini menjadi faktor yang sangat menghambat efektivitas program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Pasalnya bantuan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan awal untuk menumbuhkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang tidak akan terealisasi.

Perilaku hedonistik lain yang peneliti temukan adalah maraknya pemuda di Kabupaten Sorong yang secara sengaja menghalangi jalan umum untuk memalak uang dari pelintas, bahkan mengatakan bahwa pelintas jalan telah menabrak hewan sehingga harus membayar tebusan atau denda. Diketahui pula banyak kasus di mana hasil pemalakan tersebut digunakan untuk konsumsi miras. Gaya hidup yang mengutamakan kesenangan instan ini menciptakan perilaku malas dan tidak produktif.

Selaras dengan apa yang ditemukan peneliti, kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat, (2023) menemukan bahwa OAP cenderung tidak mempunyai dorongan dan semangat untuk meraih kesejahteraan, cenderung berperilaku malas, dan tidak produktif. Penelitian tersebut menyebutkan contoh perilakunya, yakni bila ada pohon pisang yang siap dipetik, OAP akan memetik setandan pisang dan menjualnya ke pedagang warung pisang goreng, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli sosisir pisang goreng dari warung tersebut.

Pada akhirnya, kecenderungan orientasi pada masa kini, perilaku hedonistik, dan kemalasan mengarah pada adanya ketergantungan yang tinggi pada bantuan-bantuan pemerintah, khususnya yang berbentuk BLT. Diketahui ada banyak kasus di mana masyarakat di Kabupaten Sorong meminta aparat pemerintah setempat, seperti pemerintah desa/kelurahan untuk memasukkannya ke dalam daftar masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapat BLT. Padahal berdasarkan penyaringan yang telah dilakukan, masyarakat yang menuntut tersebut tidak memenuhi syarat. Bahkan terdapat kasus di mana bentuk protes yang dilakukan hingga merusak fasilitas kelurahan, kendati sifatnya tidak terlalu parah. Perilaku ketergantungan yang ditunjukkan termasuk ke dalam karakteristik budaya kemiskinan Lewis.

Dengan adanya ketergantungan yang tinggi ini, BLT bukan dianggap sebagai modal yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bisa berdikari, melainkan sebagai “suplai pendapatan rutin”. Akibatnya adalah timbul insentif pada masyarakat agar bisa diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin, sebagaimana ditemukan di Kabupaten Sorong. Ditemukan pula bahwa banyak masyarakat menggunakan BLT yang diberikan untuk pengeluaran yang tidak produktif. Hal tersebut seperti untuk pesta yang sangat konsumtif dan meminum alkohol sampai mabuk, yang sudah menjadi budaya di Tanah Papua selama beberapa dekade. Kecenderungan suka bergaul ini juga mencerminkan eksistensi dari budaya kemiskinan.

Tanpa disadari, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah menjadi faktor yang melestarikan korupsi dan penyalahgunaan dana oleh pejabat lokal. Masyarakat memberikan jalan bagi hal itu terjadi karena masyarakat mengharapkan adanya imbalan atas suara yang diberikan terhadap pejabat terpilih. Bao et al. (2024) menyampaikan bahwa budaya terima kasih atau balas budi marak terjadi di wilayah Papua baik dalam keseharian masyarakat maupun dalam ranah pemerintahan. Hal ini menunjukkan bagaimana kemiskinan kebudayaan, khususnya kemalasan dan

ketergantungan terhadap orang lain, telah membudaya dan diterima oleh sistem kemasyarakatan. Lebih lanjut, Vance (2016) berpendapat bahwa kecenderungan selalu mencari penyelamat dari luar, seperti program pemerintah baru atau pejabat yang menduduki pemerintahan, mengakibatkan orang-orang terjebak dalam *generational poverty*.

Muller (2013) melakukan penelitian yang sangat mendalam mengenai kebudayaan yang berkembang di Tanah Papua. Setidaknya ada dua temuan dalam penelitian tersebut yang dapat menjelaskan pemicu tumbuh dan kembangnya perilaku malas dan serba instan, yang kemudian membentuk budaya kemiskinan pada OAP. *Pertama*, para anggota marga besar di Tanah Papua wajib untuk membantu anggota lainnya yang secara terus menerus mengalami keadaan yang serba kekurangan, bahkan jika anggota tersebut malas bekerja. Hal ini bisa dikatakan sebagai kewajiban dan semua usaha untuk menghindari sistem pembagian itu ditentang, bahkan dikenai sanksi sosial. van den Broek mengungkapkan bahwa kesetiakawanan sosial ini mengurangi motivasi untuk mengusahakan diri sendiri karena penghidupan dijamin oleh orang lain (Muller, 2013). Latar belakang dari pemaksaan pembagian ini adalah karena kuatnya kekerabatan di Tanah Papua, di mana seseorang bukan dinilai dari pekerjaan atau penghasilan, melainkan apakah dia anggota marga besar atau apakah dia menjadi bagian dari kelompok melalui hubungan sosial tertentu.

Kedua, eksisnya prinsip egalitarianisme, yakni keseimbangan yang perlu dicapai sehubungan dengan kemampuan, prestasi, kesejahteraan, dan kedudukan (Muller, 2013). Dalam hal ini prestasi dan akumulasi kekayaan yang melampaui keadaan orang yang lain dalam suatu lingkungan menimbulkan kecemburuan dan rasa iri hati. Ekstremnya, bahkan bisa mengarah pada upaya-upaya untuk mengembalikan orang yang menonjol tersebut kepada kedudukan yang semula, misalnya dengan membakar kepemilikan orang tersebut atau pun melalui sihir. Akumulasi kekayaan masih bisa diperbolehkan, jika diimbangi dengan pemberian bendawi kepada orang lain. Kemurahan hati untuk membagi malah akan menjadikan orang tersebut sebagai *Big Man*, meskipun seorang pemimpin tersebut tidak secara terbuka meninggikan diri di hadapan orang lain. Implikasi dari adanya pembagian paksa dan prinsip egalitarianisme memberikan disinsentif bagi para OAP untuk bekerja, berprestasi, menabung, dan berinvestasi karena akan memberikan sanksi negatif di lingkungannya.

Selain dua temuan yang dikemukakan oleh Muller (2013), peneliti mengidentifikasi faktor lain yang berperan dalam membentuk budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong. Berbagai karakteristik budaya kemiskinan yang telah diidentifikasi di atas bisa tumbuh dan berkembang pada para OAP di Kabupaten Sorong karena adanya perbedaan paradigma dalam melihat konsep kesejahteraan dengan definisi universal. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pola pikir, sikap, dan perilaku tertentu pada OAP tidak mendukung peningkatan kesejahteraan objektif yang berkaitan dengan aspek ekonomi (misalnya pengeluaran dalam sehari). Tetapi bagi para OAP, mampu makan tiga kali dalam sehari dari hasil alam menandakan mereka dalam kondisi sejahtera. Dengan begitu, mereka tidak merasa harus berupaya keras meningkatkan kualitas hidupnya yang dianggap sudah baik. Berikut merupakan kutipan pernyataan yang disampaikan salah satu peserta dalam FGD.

Di Papua, makan yang tersedia di alam saja itu tidak dianggap miskin. Maka dari itu, kembali ke pola pikir. Berharap ada konsep kemiskinan yang sesuai dengan di Papua, karena kita tidak beli baju, biasa aja. Sehingga kita perlu luruskan pandangan kita tentang kemiskinan, karena beda sudut pandangnya di Papua.

Bagi para OAP, Tanah Papua telah diberkahi oleh Tuhan dengan kekayaan alam, dan cukup untuk memberikan mereka kesejahteraan. Hal ini nampak dari adanya anomali, di mana meskipun provinsi-provinsi di Tanah Papua mempunyai indeks pembangunan manusia (indikator kesejahteraan objektif) yang rendah dibanding provinsi-provinsi lain, tetapi indeks kebahagiaannya (indikator kesejahteraan subjektif) menjadi salah satu yang tertinggi (Seda et al., 2018). Pola pikir yang cenderung hanya acuh pada kondisi lokal, lingkungan, dan cara hidup mereka sendiri termasuk ke dalam budaya kemiskinan yang diidentifikasi oleh Lewis. Alasan utamanya adalah karena membatasi pemahaman dan peluang yang muncul dari perspektif yang lebih luas dan saling terkait. Implikasinya mereka tidak menyadari bagaimana isu yang lebih besar (seperti kebijakan perdagangan global, ketimpangan ekonomi, atau perubahan iklim) memengaruhi kemiskinan di wilayah mereka, sulit beradaptasi dengan perubahan ekonomi, mengabaikan eksistensi ketimpangan sistemik, dan membatasi diri terhadap akses ke sumber daya dan jaringan yang dapat memberikan mobilitas ke atas.

Faktor lainnya yang dapat dikatakan berkontribusi paling besar terhadap pembentukan budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong adalah adanya kemiskinan struktural yang begitu parah. Keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masih banyaknya wilayah yang sulit terjangkau, dan lainnya melahirkan adanya fatalisme pada OAP. Mereka menjadi pesimis bahwa apa yang mereka lakukan, atau akan lakukan, akan membuat perbedaan dalam hidup mereka. Misalnya, dikarenakan terbatasnya pekerjaan yang layak, masyarakat tidak percaya bahwa sekolah dapat membantu meningkatkan standar hidup di masa depan. Ditambah lagi dengan jauhnya jarak sekolah dan kurangnya jumlah guru menimbulkan pemikiran untuk pasrah pada nasib, yang merupakan hasil dari proses *learned helplessness*.

3. Pengaruh Transmigran Terhadap Budaya Kemiskinan di Tanah Papua

Kebijakan transmigrasi ke Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua digalakan oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1964 hingga 1999 untuk meningkatkan pemerataan penduduk, meningkatkan produksi pertanian, dan keamanan negara. Di antara daerah-daerah tersebut, Papua menjadi target lokasi migrasi tertinggi di Indonesia (Haryanto, 2023). Tujuan sekunder dari program transmigrasi ini mengharapkan para transmigran dari Jawa untuk mentransfer pengetahuan pertanian mereka kepada OAP yang dianggap 'tertinggal' (Rumkabu, 2022). Dengan begitu, idealnya kehadiran para transmigran akan memengaruhi budaya yang selama ini diterapkan oleh OAP, salah satunya berkaitan dengan kebudayaan kemiskinan.

Spillover effect yang diharapkan oleh Pemerintah Orde Baru dari keberadaan transmigran nyatanya tidak terwujud secara ideal. Rumbiak (2000) menyimpulkan bahwa program transmigrasi yang dilaksanakan selama puluhan tahun di Papua belum memberikan manfaat langsung yang positif bagi masyarakat lokal karena para transmigran hidup dan bekerja sendiri-sendiri, terpisah dari masyarakat Papua setempat. Terdapat banyak faktor yang menciptakan adanya tembok pemisah antara OAP dengan para pendatang, salah duanya adalah perbedaan budaya (Rumbiak, 2000), serta kuatnya hubungan kekerabatan dalam budaya Tanah Papua yang mengakibatkan OAP cenderung mempunyai kecurigaan yang tinggi terhadap kelompok non-kerabat (Muller, 2013). Hal ini kemudian mempersulit kerja sama dalam sistem masyarakat dan dengan demikian, juga dalam ekonomi.

Ekspektasi bahwa akan adanya *transfer knowledge* secara alami dari para transmigran kepada OAP pada dasarnya bisa dikatakan sebagai kekeliruan dari pemerintah pada masa itu. Bahkan mungkin tak terbayang bagi para pembuat kebijakan tersebut bahwa kebijakan transmigrasi yang diselenggarakan malah semakin

memarginalisasi para OAP, sebagaimana para transmigran mempunyai modal yang lebih baik dan lebih terdidik, sehingga OAP menjadi tersingkir dari siklus ekonomi (Pamungkas et al., 2022). Tidak berlebihan jika dikatakan pemerintah pada masa itu berpartisipasi menciptakan budaya kemiskinan di Tanah Papua. Lantaran keterbatasan peluang, marginalisasi sosial, dan ketidakpastian tentang masa depan membuat individu yang kurang sejahtera merasa kurang optimis dan tidak memiliki kendali atas nasib mereka (Thomas et al., 2024). Transformasi demografi dan diskriminasi besar-besaran terhadap OAP telah mempertajam rasa identitas bersama OAP yang berujung pada kebencian dan tuntutan kemerdekaan yang terus-menerus (McGibbon, 2004). Hal ini juga menciptakan kurangnya kepercayaan dan meningkatkan kecurigaan antara OAP dan para transmigran.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti melihat adanya perbedaan yang cukup besar antara area tempat tinggal para transmigran dengan area tempat tinggal OAP. Di area tempat tinggal transmigran, area tampak terawat dengan rumput-rumput yang telah dipotong rapi. Hewan-hewan ternak juga terlihat banyak berkeliaran di sekitar. Tetapi berlawanan dengan hal itu, area tempat tinggal OAP cenderung tidak begitu terawat dan hewan ternak yang berkeliaran pun tidak begitu banyak. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai adanya ketimpangan gaya hidup antara para transmigran dengan OAP, yang masih terjadi hingga saat ini. Meskipun begitu, budaya kemiskinan telah sedikit demi sedikit berkurang, di mana banyak dari para OAP telah merubah mentalitasnya dari “korban” menjadi “agen perubahan” yang berfokus untuk memajukan masyarakat Papua, serta menjadi lebih realistis dan terbuka terhadap pemerintah Indonesia.

4. Intervensi Psikososial untuk Menghilangkan Budaya Kemiskinan

Menurut Lewis, dimungkinkan bagi negara untuk menghilangkan budaya kemiskinan tanpa terlebih dahulu menghilangkan kemiskinan, yakni dengan mengubah sistem nilai dan sikap masyarakat agar mereka tidak lagi merasa tidak berdaya, sehingga mereka mulai merasa bahwa mereka hidup di negara mereka sendiri (Lewis, 1998). Hal ini sejalan dengan gagasan Payne (2005) yang mengidentifikasi beberapa sumber daya yang membantu individu untuk keluar dari lingkungan *generational poverty*. Menurut Payne, tidak hanya keuangan yang akan membantu seseorang keluar dari *generational poverty*, tetapi juga kondisi emosional, mental, spiritual, fisik, sistem pendukung, hubungan dan panutan, serta pengetahuan tentang aturan tersembunyi.

Budaya kemiskinan berkaitan erat dengan kendala psikologis dan sosial, sehingga intervensi yang harus dilakukan tidak bisa bersifat konvensional. Beberapa literatur terkini menunjukkan bahwa menggabungkan intervensi ekonomi dan dukungan psikososial dapat menghasilkan dampak berkelanjutan pada pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan dari waktu ke waktu (Banerjee et al., 2021; Blattman et al., 2017; Lang et al., 2023; Pitch et al., 2022). Adapun variabel psikososial mencakup keyakinan dan pengalaman intrapersonal seperti *self-efficacy*, optimis terhadap masa depan, kesehatan mental, serta keyakinan dan kemampuan relasional, seperti kedudukan sosial, dukungan sosial, kendali atas pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan norma sosial (Thomas et al., 2024). Ditemukan juga pada literatur lain bahwa intervensi yang menargetkan pembentukan *personal agency* dan konstruksi terkait seperti aspirasi, *self-efficacy*, penetapan tujuan, atau inisiatif pribadi dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi di negara-negara berpendapatan rendah (Baranov et al., 2020; Bernard et al., 2023; Bhat et al., 2022). *Personal agency* mempunyai korelasi yang kuat dengan upaya pengentasan kemiskinan karena berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku dan reaksinya terhadap keadaan di luar kendalinya, meskipun tindakannya dibatasi oleh orang lain atau hal lain.

Dalam kajian World Bank yang dituliskan oleh Thomas et al. (2024) mengemukakan bahwa intervensi model *agency* yang diselenggarakan perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial ekonomi target. Negara-negara di wilayah barat dicirikan oleh kelimpahan materi dan kebebasan pilihan pribadi yang lebih besar dan tingkat individualisme budaya yang sangat tinggi, sehingga jenis *agency* yang diberikan mengarah pada tindakan sendiri menuju kemajuan yang ditentukan sendiri dan bagi kepentingan pribadi. Sebaliknya, dalam konteks perdesaan berpendapatan rendah, karakteristiknya adalah adanya jaringan hubungan sosial yang erat dan langgeng, serta saling mendukung, sehingga model *agency* yang mendominasi adalah model yang saling bergantung—yang didasarkan pada responsivitas terhadap norma sosial, peran, dan kewajiban; koordinasi dengan orang lain; dan kemajuan tujuan relasional (Thomas et al., 2024). Program pengentasan kemiskinan dalam lingkup intervensi psikososial tidak membatasi hanya pada bentuk spesifik tertentu. Bentuknya bisa disesuaikan dengan konteks masyarakat dan wilayah target, selama program tetap mempertahankan esensinya, yaitu untuk membangun *agency* pada masyarakat yang terkategori miskin. Sebelumnya Bossuoy et al. (2022) pernah melakukan eksperimen yang bertujuan untuk mendeteksi dampak dari program pengentasan kemiskinan berbasis psikososial, yaitu *community sensitization* di Niger, Afrika Barat, dengan perempuan sebagai pesertanya. Dalam program tersebut terdapat kegiatan pemutaran film fiksi realistis berdurasi 20 menit tentang kisah seorang perempuan bernama Amina yang diikuti oleh diskusi kelompok tentang aspirasi, nilai, dan norma masyarakat, serta pelatihan keterampilan hidup selama seminggu yang dibangun di atas film tersebut. Keterampilan yang diajarkan seperti pengambilan keputusan yang efektif, pemecahan masalah, penetapan tujuan, komunikasi interpersonal, dan kepemimpinan perempuan. Hasilnya menemukan bahwa program *community sensitization* mempunyai *cost-effective* yang tinggi dan menunjukkan dampak signifikan. Saat dilakukan pengambilan data setelah 18 bulan berakhirnya program, mereka yang berada dalam kelompok target program mengalami peningkatan konsumsi rumah tangga masing-masing hingga US\$0,25, peningkatan pendapatan bisnis tahunan masing-masing sebesar US\$267,85 (atau 107,39%), serta peningkatan ketahanan pangan sebesar US\$0,63.

Jindra dan Jindra (2016) melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap partisipan program *Getting Ahead* (GA) yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit Bridges di salah satu kota di Amerika Serikat. Program GA dilaksanakan dalam bentuk kelas berdurasi tiga jam yang bertujuan untuk mendorong peserta mempertimbangkan “peta mental” dan perilaku terkait yang menyertainya, menetapkan tujuan, dan berupaya menuju kehidupan yang lebih stabil. Masing-masing kelas didampingi seorang fasilitator dan seorang asisten fasilitator mengajar, dengan salah satu atau keduanya memiliki latar belakang kemiskinan atau merupakan lulusan kelas sebelumnya.

Melalui program GA, para partisipan diminta untuk merefleksikan perbedaan dalam cara orang-orang di kelas bawah, menengah, dan atas dalam menyusun dan mengarahkan hidup mereka. Dengan demikian, kelas tersebut pada dasarnya mendorong para peserta untuk memberikan kritik diri atas kehidupan mereka, dan membuat rencana konkret di masa depan. Dengan informasi mengenai model baru untuk menghadapi situasi kehidupan, peserta akan mempelajari wawasan dan keterampilan yang baru, serta cara menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari hasil penelitian yang dilakukan Jindra dan Jindra (2016), 18 partisipan tergolong *successful*, 17 *moderately successful*, dan 4 *not successful*, berdasarkan sejauh mana mereka telah mencapai tujuan yang ditetapkan untuk diri mereka sendiri selama program GA. Mayoritas dari para partisipan tergolong sukses, yang artinya program GA yang menggunakan pendekatan psikososial untuk membangun *personal agency* termasuk efektif dalam melakukan intervensi pada budaya kemiskinan.

5. Alternatif Intervensi Psikososial di Kabupaten Sorong

Sebelum menyusun intervensi psikososial dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sorong, maka perlu dipetakan terlebih dahulu konteks budaya dan sosial ekonomi di Kabupaten Sorong. Salah satu karakteristik yang menonjol pada masyarakat di Kabupaten Sorong adalah lebih dari setengah penduduknya menganut agama Kristen. Berdasarkan observasi peneliti, jumlah Gereja sebagai tempat beribadat juga cukup banyak dengan jarak yang berdekatan. Gereja memainkan peran sentral sebagai tempat perlindungan, penguatan moral, dan sumber harapan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Pada kondisi konflik, Gereja tidak hanya menjadi saksi penderitaan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat serta melawan eksploitasi dan ketidakadilan. Kesukuan juga masih kental berkembang di Kabupaten Sorong. Di sana, seseorang biasanya lebih dikenal dari suku asalnya dan suku menjadi dasar dalam relasi sosial dan kekerabatan. Pemimpin adat, tokoh suku, dan kepala kampung masih memegang otoritas tinggi dalam mengambil keputusan penting, termasuk soal pembangunan dan penyelesaian konflik.

Melihat besarnya peran dan pengaruh Gereja maupun kesukuan di Kabupaten Sorong, maka pemanfaatan keduanya dalam intervensi psikososial untuk pengentasan kemiskinan menjadi sangat potensial. Penyelenggara program akan tetap berada di Pemerintah Kabupaten Sorong, namun pada implementasinya akan didukung oleh Gereja. Sementara pemimpin adat, tokoh suku, dan kepala kampung, berperan untuk mensosialisasikan dan menciptakan kepercayaan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan. Berikut program-program yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Sorong sesuai dengan konteks lokalnya:

- a. Pelatihan Keterampilan Hidup Berbasis Spiritualitas
Pelatihan ini berkaitan dengan *self-efficacy*, optimisme terhadap masa depan, kesehatan mental, serta keyakinan dan kemampuan relasional. Materi-materi yang disampaikan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dengan bantuan konsultan yang relevan, kemudian disosialisasikan kepada pastor, suster, dan tokoh awam Gereja selaku pihak yang akan menyampaikan. Mengingat bahwa di Kabupaten Sorong kental dengan kesukuan, maka materi harus menekankan pada norma sosial, peran, dan kewajiban dalam kehidupan bersama dan kemajuan untuk tujuan relasional. Dengan pendekatan pastoral dan dihubungkan dengan nilai-nilai Injil, harapannya esensi materi dapat tersampaikan dengan baik dan menumbuhkan motivasi.
- b. Program Aspirasi dan Visi Masa Depan
Program ini berfokus untuk membantu masyarakat merefleksikan kembali hidupnya dan menyadari perbedaan cara hidup orang-orang di kelas bawah, menengah, dan atas dalam menyusun dan mengarahkan hidup mereka. Selanjutnya, masyarakat akan didorong untuk membuat rencana konkret di masa depan. Pada tahap ini akan diselenggarakan pula pelatihan-pelatihan keterampilan praktis untuk menghadapi situasi kehidupan seperti wawancara kerja, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Dengan berbasiskan praktik langsung, harapannya masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Budaya kemiskinan telah secara signifikan berkontribusi membentuk kemiskinan yang berkepanjangan di Kabupaten Sorong. Budaya kemiskinan tersebut ditandai dengan orientasi masa kini yang mengarah pada kurangnya dorongan untuk berkembang, perilaku hedonistik, dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam memproduksi budaya kemiskinan di Kabupaten Sorong adalah

kesetiakawanan sosial untuk membantu anggota marga lainnya yang mengalami kesulitan, egalitarianisme, perbedaan paradigma dalam melihat kesejahteraan, dan adanya berbagai masalah struktural yang mengenyahkan harapan masyarakat untuk maju dalam hidupnya. Kehadiran para transmigran yang diekspektasikan dapat melakukan *transfer knowledge* kepada para OAP, juga malah semakin memperkuat fatalisme karena menciptakan marjinalisasi ekonomi terhadap OAP. Budaya kemiskinan yang masih melekat pada para OAP mengakibatkan program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun Pemkab Sorong tidak begitu efektif dan efisien dalam mengurangi angka kemiskinan. Dikarenakan program-program yang diselenggarakan tidak dimanfaatkan secara optimal, atau dipergunakan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Maka dari itu, intervensi terhadap budaya kemiskinan krusial untuk mengubah sistem nilai dan sikap masyarakat agar mereka tidak lagi merasa tidak berdaya. Berhubungan dengan hal itu, peneliti menawarkan alternatif intervensi psikososial sesuai konteks lokal melalui pendekatan spiritualisme. Dalam pelaksanaannya intervensi ini akan didukung oleh Gereja, pemimpin adat, tokoh suku, dan kepala kampung

Daftar Pustaka

- Aminah, S., Mulyadi, M., Suropto, Mulyadi, M., Kasmad, R., Apriani, T., Ramadhan, A., & Baharuddin, G. (2023). *Kemiskinan Ekstrem: Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*.
- Anggraini, M. (2008). Perilaku Anggota Rumah Tangga Miskin dalam Memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (BLT PKPS-BBM). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(2), 119–140.
- Banerjee, D., Rao, T. S. S., Kallivayalil, R. A., & Jave, A. (2021). Psychosocial Framework of Resilience: Navigating Needs and Adversities During the Pandemic, A Qualitative Exploration in the Indian Frontline Physicians. *Frontiers in Psychology*, 12(622132), 1–10.
- Bao, B., Paramma, P., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2024). Analisis Praktek Korupsi dalam Implementasi Otonomi Khusus di Papua. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6917–6927.
- Baranov, V., Bhalotra, S., Biroli, P., & Maselko, J. (2020). Maternal Depression, Women's Empowerment, and Parental Investment: Evidence from a Randomized Controlled Trial. *American Economic Review*, 110(3), 824–859.
- Bell, M., Fosse, N., Lamont, M., & Rosen, E. (2016). Culture of Poverty, Beyond the. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*, 1–16.
- Bernard, T., Dercon, S., Orkin, K., Schinaia, G., & Taffesse, A. S. (2023). *The Future in Mind: Aspirations and Long-term Outcomes in Rural Ethiopia* (2023–10).
- Bhat, B., de Quidt, J., Haushofer, J., Patel, V., Rao, G., Schilbach, F., & Vautrey, P. (2022). *The Long-Run Effects of Psychotherapy on Depression, Beliefs, and Economic Outcomes* (30011).
- Blattman, C., Jamison, J. C., & Sheridan, M. (2017). Reducing Crime and Violence: Experimental Evidence from Cognitive Behavioral Therapy in Liberia. *American Economic Review*, 107(4), 1165–1206.
- Bossuroy, T., Goldstein, M., Karimou, B., Karlan, D., Kazianga, H., Parienté, W., Premand, P., Thomas, C. C., Udry, C., Vaillant, J., & Wright, K. A. (2022). Tackling Psychosocial and Capital Constraints to Alleviate Poverty. *Nature*, 605(7909), 291–297.
- Cole, M., Glick, J., Gay, J., & Sharpe, D. (1971). *The Cultural Context of Thinking and Learning*. Basic Books.

- Dekasari, D. A., Zuber, A., & Slamet, Y. (2018). Poverty Culture of Community in Bengawan Solo River Bank in Surakarta, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018)*, 782–785.
- Dixon, J., & Frolova, Y. (2011). Existential Poverty: Welfare Dependency, Learned Helplessness and Psychological Capital. *Poverty & Public Policy*, 3(2), 279–298.
- Ekardo, A., Firdaus, & Elfemi, N. (2014). Efektfitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–19.
- Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2014). A Slow-Motion Genocide: Indonesian Rule in West Papua. *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, 1(2).
- Gelo, O., Braakmann, D., & Benetka, G. (2008). Quantitative and Qualitative Research: Beyond the Debate. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 42, 266–290.
- Ginting, T. A. B., Sudibia, I. K., Dewi, N. P. M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(6), 186–195.
- Haryanto, R. (2023, December 8). Transmigrasi Tuk Jadi Petani. *DetikNews*. <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20231208/Transmigrasi-tuk-Jadi-Petani/>
- Jindra, I. W., & Jindra, M. (2016). Connecting Poverty, Culture, and Cognition: The Bridges Out of Poverty Process. *Journal of Poverty*, 22(1), 42–64.
- Kambuaya, B., & Kambuaya, M. K. P. (2024). The Effectiveness of Community Poverty Reduction Programmes In the Province of Papua, Indonesia. *Social Science and Humanities Journal (SSHJ)*, 8(10), 5224–5235.
- Labov, R. (1972). *Language in the Inner City*. University of Pennsylvania Press.
- Lang, M., Soule, E., & Tinsley, C. H. (2023). *Psychology, Skills, or Cash: Evidence on Complementary Investments for Anti-Poverty Programs* (10503).
- Leacock, E. (1980). Politics, Theory, and Racism in the Study of Lack Children. In S. Diamond (Ed.), *Theory and Practice* (pp. 153–178). Mouton.
- Lewis, O. (1966). *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty—San Juan and New York*. Random House.
- Lewis, O. (1998). The Culture of Poverty. *Society*, 35(2), 7–9.
- Livingston, V., Davis-Wagner, D., Chung, I., Nevels, B. J., & Gabriel, N. (2020). Trapped in Poverty: A Conceptual Framework to Evaluate the Culture of Poverty vs the Culture of Inequality Theses for Black Female-headed Families. *International Journal of Social Policy and Education*, 2(5), 1–13.
- Lumbantoruan, J. F. A. K., Ohyver, M., & Moniaga, J. V. (2023). Developing a Poverty Model in Papua using Geographically Weighted Regression. *Procedia Computer Science*, 227, 243–252.
- McGibbon. (2004). *Plural Society in Peril: Migraton, Economic Change, and the Papua Conflict (Policy Studies 13 on East-West Center-Washington)*.
- Miranti, R. (2017). Understanding the Relationships between Development Factors and Regional Poverty: What Have We Learned from Indonesia? *Journal of Poverty*, 21(6), 483–507.
- Moldenhauer, O., Bruckner, T., & Petschel-Helf, G. (1999). The Semi-qualitative Reasoning and Probability Distributions in Assessing Possible Behaviors of a Socio-economic System. In *Computational Intelligence for Modeling, Control and Automation*. IOS Press.
- Morrison, T. (1993). *The Bluest Eye*. New York: Plume.

- Muller, M. (2013). *Kebudayaan dan Perkembangan Ekonomi: Suatu Penelitian Empiris Lingkungan Budaya dan Kemampuan-kemampuan Wiraswasta di Tanah Papua, Indonesia (Nugini Barat)*. Marburg: Disertasi, Philipps-Universität Marburg.
- Ogbeide, E. N. O., & Agu, D. O. (2015). Poverty and Income Inequality in Nigeria: Any Causality? *Economic and Financial Review*, 5(3), 439–452.
- Pamungkas, C., Oktafiani, I., & Imbhiri, L. (2022). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16–38.
- Patterson, O. (2014). Making Sense of Culture. *Annual Review of Sociology*, 40, 1–30.
- Payne, R. K. (2005). *A Framework for Understanding Poverty* (4th ed.). Highlands, TX: aha! Process, Inc.
- Phillips, J. D. (2018). The Culture of Poverty: On Individual Choices and Infantilizing Bureaucracies. In C. Frisby & W. O'Donohue (Eds.), *Cultural Competence in Applied Psychology: An Evaluation of Current Status and Future Directions*. Cham, Switzerland: Springer.
- Pitch, N., Verma, R., Davidson, L., Robertson, T., Anagnostopoulos, G., Sunkonkit, K., Qazi, A., Ambreen, M., Mekhuri, S., Miller, M. R., Orkin, J., & Amin, R. (2022). Screening for Psychosocial Risk in Caregivers of Children with Medical Complexity During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. *BMJ Open*, 13(4).
- Romadhon, M. A. (2024). Analysis of the Determinants of Poverty in the Province of Papua. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 1(10), 799–806.
- Rumbiak, M. C. (2000). *Migrasi Spontan dan Transmigrasi*.
- Rumkabu, E. (2022). Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39–55.
- Seda, F. S., Setyawati, L., Pera, Y. H. T., Febriani, R., & Pebriansyah. (2018). Social Policies, Social Exclusion & Social Well-Being in Southeast Asia: A Case Study of Papua, Indonesia. *Economics & Sociology*, 11(3), 147–160.
- Small, M. L., Harding, D. J., & Lamont, M. (2010). Reconsidering Culture and Poverty. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 629(1), 6.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Suryawan, I. N. (2015). Identitas yang Terpecah dan Peluang Transformasi Sosial Budaya di Tanah Papua. *Kawalu: Journal of Local Culture*, 2(1), 16–41.
- Tabuni, T., Goni, J. H., Nengah, I., & Mokalu, B. J. (2013). Kajian Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Society*, 4, 81–90.
- Thomas, C., Premand, P., Bossuroy, T., Sambo, S. A., Markus, H., & Walton, G. (2024). *How Culturally Wise Psychological Interventions Help Reduce Poverty (No. 10824)*. Washington, DC: World Bank.
- Vaisey, S. (2010). What People Want: Rethinking Poverty, Culture, and Educational Attainment. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 629(1), 75–101.
- Vance, J. D. (2016). *Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis*. Harper Collins.
- Whiting, G. C. (1971). Code Restrictedness and Opportunities for Change in Developing Countries. *Journal of Communication*, 21(1), 36–57.
- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (2014). Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Differences Metric. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1271–1288.